



Research Article

Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Optimalisasi Kinerja UMKM Dan Lembaga Keuangan Syariah Bangkalan

Mariyatul Kiptiyah¹, Moh. Ibnu Rusy Ramadhan², M. Syarif Hidayatullah³

1. Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; mariyakiptiyah24@gmail.com
2. Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; ibnurusy051103@gmail.com
3. Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; msarifudinhidayatullah@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Managing: Jurnal Bisnis dan Manajemen**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : April 15, 2025
Accepted : June 19, 2025

Revised : May 16, 2025
Available online : July 14, 2025

How to Cite: Mariyatul Kiptiyah, Moh. Ibnu Rusy Ramadhan, & M. Syarif Hidayatullah. (2025). The Role of the Regency Government in Optimizing the Performance of MSMEs and Islamic Financial Institutions in Bangkalan. *Managing: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 6–14. <https://doi.org/10.61166/managing.v2i2.35>

The Role of the Regency Government in Optimizing the Performance of MSMEs and Islamic Financial Institutions in Bangkalan

Abstract. This study aims to analyze the role of the Bangkalan Regency Government in optimizing the performance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and Islamic financial institutions in the region. Given that MSMEs contribute significantly to the local economy, this study explores

government policies and programs that support MSME development and how Islamic financial institutions can play a strategic role. The method used in this study is a qualitative approach through data collection through literature studies and documentation studies. The results obtained from the study indicate that government policy support, such as the provision of capital assistance and training, as well as collaboration with Islamic financial institutions, has increased financing accessibility and strengthened the capacity of MSMEs. However, challenges such as lack of financial literacy and limited infrastructure still need to be addressed. This study recommends increasing synergy between the government, MSMEs, and Islamic financial institutions to achieve optimal and sustainable performance in Bangkalan Regency.

Keywords: District Government, Performance Optimization, MSMEs, Islamic Financial Institutions

Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam optimalisasi kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta lembaga keuangan syariah di daerah tersebut. Mengingat UMKM berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal, penelitian ini mengeksplorasi kebijakan dan program pemerintah yang mendukung pengembangan UMKM serta bagaimana lembaga keuangan syariah dapat berperan sebagai mitra strategis. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data dengan cara study literatur serta studi dokumentasi. Hasil yang didapatkan dari penelitian memperlihatkan bahwa dukungan kebijakan pemerintah, seperti pemberian bantuan modal dan pelatihan, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, telah meningkatkan aksesibilitas pembiayaan dan memperkuat kapasitas UMKM. Namun, tantangan seperti kurangnya literasi keuangan dan keterbatasan infrastruktur masih perlu diatasi. Penelitian ini menyarankan peningkatan sinergi antara pemerintah, UMKM, serta lembaga keuangan syariah supaya mencapai kinerja yang optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Bangkalan.

Kata kunci: Pemerintah Kabupaten, Optimalisasi Kinerja, UMKM, Lembaga Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Intervensi pemerintah dapat mencakup penyediaan infrastruktur, kebijakan fiskal yang mendukung, serta memfasilitasi akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti permodalan dan pasar. Di tingkat lokal, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kemajuan usaha, terlebih bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang sering menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Dengan demikian, peran aktif pemerintah sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kabupaten Bangkalan, yang berada di Pulau Madura, mempunyai potensi ekonomi yang signifikan, khususnya melalui sektor UMKM. UMKM di daerah ini menjadi motor penggerak utama perekonomian lokal, memberikan kontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja dan distribusi pendapatan masyarakat. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa sektor UMKM di Bangkalan menghimpun tenaga kerja dengan jumlah besar dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Namun, meskipun memiliki peran strategis, UMKM di Bangkalan masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal akses permodalan dan manajemen bisnis (Tambunan, 2012).

Untuk mengatasi tantangan ini, Lembaga Keuangan Syariah berperan penting dalam menyediakan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga ini menawarkan skema pembiayaan yang adil, seperti akad bagi hasil, yang memungkinkan pelaku UMKM di Bangkalan mendapatkan akses modal tanpa harus terbebani oleh suku bunga yang tinggi. Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah sangat relevan di Bangkalan, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam dan lebih menyukai transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Ascarya, 2013). Selain menyediakan modal, Lembaga Keuangan Syariah juga memberikan pendampingan kepada UMKM dalam pengelolaan keuangan dan manajemen usaha.

Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi UMKM di Bangkalan tidak hanya terbatas pada masalah permodalan. Banyak UMKM yang masih menghadapi kendala dalam hal manajemen, seperti pengelolaan keuangan yang belum optimal, rendahnya kapasitas inovasi, serta keterbatasan akses pasar yang lebih luas (Putri, 2021). Faktor-faktor ini menghambat UMKM untuk bersaing dan berkembang di pasar dengan lebih kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, UMKM, dan Lembaga Keuangan Syariah untuk membuat ekosistem bisnis menjadi lebih kuat dan juga berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan memiliki peran strategis dalam memfasilitasi kolaborasi antara UMKM dan Lembaga Keuangan Syariah. Pemerintah dapat mendorong kebijakan yang mendukung peningkatan akses permodalan, menyediakan program pelatihan dan pendampingan bagi UMKM, serta memperkuat jaringan pasar bagi produk-produk lokal. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai regulator yang memastikan bahwa kerja sama antara UMKM dan Lembaga Keuangan Syariah berjalan selaras dengan aturan yang berlaku, sehingga mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perekonomian daerah.

Tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari peran pemerintah dalam memajukan perekonomian Kabupaten Bangkalan melalui kerja sama diantara UMKM dan Lembaga Keuangan Syariah. Dengan menyoroti tantangan yang dihadapi UMKM, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana peran pemerintah dapat dioptimalkan untuk mengatasi kendala yang ada dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Kabupaten Bangkalan.

KAJIAN PUSTAKA

Pemerintah Daerah

Undang-undang tentang otonomi daerah menjelaskan dua jenis pemerintahan di Indonesia. Pertama, ada pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden. Presiden memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, ada pemerintah daerah yang bertugas mengurus wilayahnya masing-masing secara mandiri. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas agar menata dan mengelola wilayahnya, tetapi tetap berada di bawah aturan negara kesatuan Indonesia.

Pemerintahan di tingkat nasional diselenggarakan oleh presiden yang didampingi oleh seorang wakil presiden serta menteri-menteri negara. Sementara itu, pemerintahan daerah dijalankan oleh gubernur, bupati, atau wali kota bersama perangkat daerah sebagai elemen pelaksana pemerintahan daerah. Pemahaman

tentang daerah bervariasi bergantung pada sudut pandang yang digunakan. Dari aspek ekonomi, terdapat tiga definisi daerah sebagai berikut:

1. Daerah Homogen

Daerah diartikan menjadi sebuah wilayah di mana aktivitas ekonomi berlangsung dengan ciri-ciri yang serupa di berbagai bagian wilayah tersebut. Kesamaan ini dapat dilihat dari aspek penghasilan per kapita, kondisi sosial budaya, geografis, dan lainnya.

2. Daerah Modal

Daerah yang dilihat menjadi ruang ekonomi yang didominasi oleh satu atau beberapa inti aktivitas ekonomi.

3. Daerah Perencanaan atau Administrasi

Daerah didefinisikan sebagai ruang ekonomi yang terletak dalam naungan administrasi tertentu, seperti kabupaten, provinsi, kota, atau kecamatan.

Salah satu tanggung jawab utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini mencakup upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja, meningkatkan layanan kesehatan, memperbaiki akses pendidikan, serta memastikan keamanan dan perlindungan pada lingkungan tempat tinggal mereka. Menurut (Sedarmayanti, 2016) globalisasi dan revolusi sudah menjadikan desentralisasi tidak sekedar sebagai kebutuhan politik, namun juga kebutuhan ekonomi. Pada saat ini investor tidak hanya mempertimbangkan kemampuan investasi sebuah negara secara keseluruhan, tetapi juga menilai wilayah-wilayah tertentu yang menawarkan peluang terbaik. Selain dari potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta ketersediaan infrastruktur, faktor lain yang menjadi pertimbangan meliputi karakteristik pemerintahan daerah serta sikap masyarakat setempat terhadap investasi asing.

Daerah memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya guna bersaing di pasar global. Meskipun globalisasi dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan negara dan budaya bangsa, hal ini juga menawarkan peluang besar bagi pihak yang mampu memanfaatkannya. Peluang tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, tugas pemerintah sangat krusial dalam menjalankan proses pembangunan yang berfokus pada peningkatan produktivitas ekonomi. Selain itu, pemerintah juga harus mampu membangun landasan yang mendukung perkembangan kewirausahaan sebagai salah satu pilar kemajuan suatu negara (Zaelani et al., 2022).

Optimalisasi Kinerja

Optimalisasi berarti pencapaian hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien, sehingga optimalisasi juga berarti pencapaian hasil yang diharapkan secara efektif dan efisien. Optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai ukuran di mana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan yang dilakukan (Rattu et al., 2022). Kinerja umumnya didefinisikan sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh individu atau kelompok dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. (Menurut Prawirosentono, 1999), kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugasnya.

Optimalisasi kinerja kabupaten merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan holistik. Dengan merencanakan secara strategis, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi, dan melibatkan masyarakat, kabupaten dapat mencapai kinerja yang lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat. Untuk lebih memahami teori dan praktik yang mendasari optimalisasi kinerja kabupaten, Anda dapat merujuk ke berbagai literatur dan jurnal yang membahas topik ini.

UMKM

Definisi tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah “Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu”. Pemilik usaha kecil biasanya tidak terlalu menekankan pada strategi bisnis atau bahkan memiliki rencana pengembangan bisnis. Mereka fokus pada cara menjual produknya tanpa memikirkan bagaimana cara melakukan perbaikan agar produk yang dijualnya menjadi lebih baik. Kebanyakan pengusaha UMKM hanya fokus pada penjualan produknya, dan hasil usaha yang diraihinya biasanya dihabiskan untuk konsumsi pribadi dan konsumsi keluarga. Jika semua usaha kecil dan menengah menghabiskan seluruh keuntungannya hanya untuk konsumsi pribadi, maka wajar jika dibayangkan usahanya tidak akan berkembang. Usaha yang dikelola secara lokal tidak mandiri dan hanya menunggu pemasukan modal.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bangkalan. UMKM tidak hanya berperan penting dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia (Kementerian KUKM, 2020). Kondisi ini juga tercermin di Bangkalan, di mana sebagian besar penduduknya bekerja di sektor UMKM.

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan (finansial institution) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya (Afrianty et al., 2020). Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan, pasal 1.b menyebutkan bahwa Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Menurut SK. Menkeu RI No. 792 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi persusahaan namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga

keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Lembaga keuangan syariah adalah sebuah perusahaan yang beroperasi di sektor jasa keuangan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah ini menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam dan menggantinya dengan akad-akad tradisional Islam, yang biasa dikenal sebagai prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah pada dasarnya merupakan sistem norma yang berlandaskan ajaran Islam (Solehah, 2014). Lembaga keuangan syariah lebih menekankan pada konsep bagi hasil dan penggunaan beberapa akad muamalah. Secara prinsip, lembaga ini berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Peran lembaga keuangan ini sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi, karena memungkinkan pihak yang kekurangan dana untuk tetap memiliki peluang mengembangkan usaha mereka dengan bantuan lembaga keuangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana pemerintah daerah berinteraksi dengan UMKM dan lembaga keuangan syariah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti laporan tahunan, kebijakan pemerintah, dan data statistik mengenai UMKM dan lembaga keuangan syariah di Kabupaten Bangkalan.

PEMBAHASAN

Peran Strategis Pemerintah Kabupaten Dalam Pengembangan UMKM

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian lokal, termasuk di Kabupaten Bangkalan. Di wilayah ini, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, serta memajukan perekonomian desa dan kawasan perkotaan. Peran Pemerintah Kabupaten Bangkalan menjadi sangat vital dalam meningkatkan daya saing dan kinerja UMKM. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang membantu pelaku UMKM melalui penyediaan pelatihan, akses ke pasar, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan usaha. Selain itu, peran regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha, sehingga mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan telah meluncurkan program bantuan modal usaha (BMU) yang ditujukan untuk para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di wilayah tersebut (Wahyudi, 2024). Program ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya melalui bantuan berupa peralatan produksi. Bantuan ini diberikan kepada lebih dari 500 pelaku IKM di berbagai sektor seperti konveksi, batik, kerajinan, perak, dan usaha makanan seperti roti dan kue. Program tersebut menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai

Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagai sumber pendanaan dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas serta daya saing produk lokal. Pj Bupati Bangkalan menekankan bahwa pemberian alat produksi ini tidak hanya bertujuan untuk memajukan usaha para penerima, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Bangkalan. Program ini juga mencakup evaluasi dan monitoring oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan dari bantuan yang diberikan.

Kolaborasi Pemerintah Dan Lembaga Keuangan Syariah

Prinsip pembiayaan lembaga keuangan syariah (LKS) berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. LKS berdasarkan prinsip keadilan dan kerjasama yang sesuai dengan syariah. Keberadaan LKS di Kabupaten Bangkalan sangat penting untuk mendukung akses pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat, yang sebagian besar beragama Islam. Untuk meningkatkan kinerja UMKM di Bangkalan, kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten dan LKS sangat penting. Pemerintah dapat membuat kebijakan yang mendorong penggunaan pembiayaan syariah bagi UMKM dan mendorong kerjasama antara LKS dan pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif dan subsidi kepada UMKM yang menggunakan pembiayaan dari LKS, sehingga meningkatkan daya tarik UMKM untuk memilih pembiayaan syariah.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah melakukan kolaborasi dengan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi digital dan pengembangan ekonomi terpadu (Aziz, 2024). Kolaborasi ini bertujuan untuk memanfaatkan peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam menangani berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi pascapandemi. UTM berkontribusi melalui penyediaan literasi dan dukungan teknologi digital untuk masyarakat dan UMKM, membantu mempercepat adopsi teknologi finansial dan digital di wilayah tersebut. Salah satu program penting dalam kolaborasi ini adalah Madura DigiCreative Fest, yang merupakan bagian dari Festival Ekonomi dan Keuangan Digital 2024. Program ini diinisiasi oleh Bank Indonesia, bekerja sama dengan Pemkab Bangkalan dan UTM. Kegiatan ini berfokus pada edukasi masyarakat tentang transaksi pembayaran non-tunai, mendorong penggunaan teknologi pembayaran seperti QRIS, serta memajukan literasi keuangan digital, yang diharapkan bisa memperkuat sektor ekonomi lokal, terutama UMKM.

Tantangan Dalam Optimalisasi Peran Pemerintah Kabupaten

Meskipun demikian, optimalisasi peran Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam pengembangan UMKM dan LKS dihadapkan pada beberapa tantangan. Pertama, masih terbatasnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami konsep dan manfaat pembiayaan syariah, sehingga akses ke LKS masih relatif rendah. Kedua, koordinasi antara pemerintah, UMKM, dan LKS seringkali kurang optimal. Keterbatasan sumber daya dan dukungan teknis di kalangan aparat pemerintah daerah menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan yang efektif. Selain itu, akses informasi dan bantuan teknis bagi UMKM terkadang masih terbatas hanya pada pelaku usaha yang berada

di pusat kota, sementara UMKM di pedesaan seringkali sulit mendapatkan akses yang sama. Ketiga, infrastruktur pendukung UMKM seperti akses internet, pusat pelatihan, serta layanan pemasaran digital yang masih terbatas juga menjadi tantangan bagi pengembangan UMKM yang ingin bertransformasi ke arah yang lebih modern dan kompetitif.

Upaya Dan Strategi Optimalisasi Pemerintah

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan dapat mengadopsi berbagai strategi dan kebijakan yang lebih terintegrasi. Misalnya, meningkatkan literasi keuangan syariah melalui pelatihan yang bekerja sama dengan LKS, akademisi, dan lembaga masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur digital serta perluasan akses internet di wilayah pedesaan juga harus menjadi prioritas agar UMKM dapat memanfaatkan teknologi dalam memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi bisnis. Pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi antara dinas terkait, lembaga keuangan, dan komunitas UMKM untuk memastikan pelaksanaan kebijakan lebih merata. Misalnya, penyusunan roadmap atau rencana induk pengembangan UMKM yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan akan membantu menciptakan sinergi antara sektor-sektor tersebut.

Salah satu Upaya Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan lembaga keuangan syariah, salah satunya dengan Pegadaian Syariah, bekerja sama untuk mengembangkan UMKM. Salah satu contoh kerja sama ini adalah melalui program Pembiayaan Arrum BPKB, di mana Pegadaian Syariah memberikan pelaku UMKM di Bangkalan akses ke pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Agustina Avia, 2024). Program ini memberikan akses modal kepada pelaku UMKM dengan menggunakan BPKB kendaraan sebagai jaminan. Kolaborasi ini membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam memperluas bisnis mereka, meningkatkan aset mereka, dan membantu mereka yang memiliki akses terbatas ke modal untuk tetap berkembang. Dengan menyediakan berbagai kebijakan dan program pelatihan, pemerintah kabupaten mendukung kerja sama ini. Kolaborasi ini penting karena Pegadaian Syariah menyediakan solusi syariah yang mempertimbangkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan keuntungan.

KESIMPULAN

Peran Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam optimalisasi kinerja UMKM dan Lembaga Keuangan Syariah sangat penting dalam meningkatkan daya saing perekonomian daerah. Dukungan berupa kebijakan, infrastruktur, dan fasilitasi akses pembiayaan syariah menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan UMKM. Dengan strategi yang tepat dan sinergi antara pemerintah, LKS, dan UMKM, diharapkan kinerja sektor UMKM di Kabupaten Bangkalan dapat terus berkembang, memberikan kontribusi lebih besar pada ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan ini menggambarkan bagaimana peran pemerintah daerah dapat dioptimalkan untuk memperkuat UMKM melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dan berbagai langkah strategis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2020). Lembaga Keuangan Syariah. In *Penerbit CV Zigie Utama*.
- Agustina Avia, B. D. (2024). *Analisa Peran ARRUM BPKB Dengan Akad Rahn Terhadap Pengembangan UMKM Di Tanjung Bumi Bangkalan*. 10(01), 70–89.
- Ascarya. (2013). *AKAD & PRODUK BANK SYARIAH* (Edisi 1, C). Rajawali Pers.
- Aziz, A. (2024). *Pemkab Bangkalan-UTM kerja sama untuk percepatan ekonomi digital*. Antara Kantor Berita Inndonesia. <https://www.antaraneews.com/berita/4178151/pemkab-bangkalan-utm-kerja-sama-untuk-percepatan-ekonomi-digital>
- Putri, S. (2021). Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.67>
- Rattu, P. N., Pioh, N. R., & Sampe, S. (2022). Optimalisasi Budaya Organisasi. *Jurnal Governance*, 2(1), 1–9.
- Sedarmayanti. (2016). *Manajemen sumber daya manusia : reformasi birokrasi dan manajemen pegawai negeri sipil*. PT Refika Aditama.
- Solehah, N. (2014). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Umkm (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Sektor Batik (Studi Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Kabupaten Bangkalan)*. 1–188.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia : isu-isu penting*. LP3ES.
- Wahyudi, E. D. (2024). *Pemkab Bangkalan Berikan BMU bagi IKM, Pj Bupati: Semoga Bermanfaat*. Pemerintah Kabupaten Bangkalan. <https://bangkalankab.go.id/read/berita/5187-pemkab-bangkalan-berikan-bmu-bagi-ikm-pj-bupati-semoga-bermanfaat>
- Zaelani, R., Sujana, H., & Zaky, M. (2022). Optimalisasi Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator; Katalisator; Regulator Dan Pemahaman Keuangan Syariah Dalam Mengembangkan Umkm Di Sukabumi Kota. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 957–972. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2436>